

ANALISIS PERENCANAAN PARTISIPATIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNTUK DESA BERDAYA DAN MANDIRI

ANALYSIS OF PARTICIPATORY PLANNING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR EMPOWERED AND INDEPENDENT VILLAGES

**EKA PURNA YUDHA^{1*}, ENDAH DJUWENDAH², TUTI KARYANI³, RESA ANA
DINA⁴**

Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran¹

Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran²

Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran³

Fakultas Ekologi Manusia, IPB University⁴

*E-mail : eka.purna.yudha@unpad.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan berkelanjutan di tingkat desa memerlukan pendekatan perencanaan partisipatif untuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Penelitian ini menganalisis perencanaan partisipatif dalam pembangunan berkelanjutan di Desa Cipacing guna mewujudkan desa yang berdaya dan mandiri. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat meningkatkan efektivitas program pembangunan dan rasa kepemilikan terhadap hasilnya. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta koordinasi antar pemangku kepentingan masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan kapasitas masyarakat dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kesimpulannya, perencanaan partisipatif berperan penting dalam menciptakan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pembangunan Berkelanjutan, Perencanaan Partisipatif, Desa Berdaya, Kemandirian Desa.

ABSTRACT

Sustainable development at the village level requires a participatory planning approach to ensure community involvement in every stage of development. This research analyses participatory planning in sustainable development in Cipacing Village to create an empowered and independent village. The research method used is qualitative with interviews, observations, and documentation studies. The results show that community involvement increases the effectiveness of development programmes and the sense of ownership of the results. However, challenges such as lack of community understanding, limited resources, and coordination between stakeholders are still the main obstacles. Therefore, strategies to increase community capacity and collaboration between stakeholders are needed to support sustainable development. In conclusion, participatory planning plays an important role in creating inclusive and sustainable village development.

Keywords: Sustainable Development, Participatory Planning, Empowered Village, Village Independence.

PENDAHULUAN

Desa Cipacing terletak di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung. Lokasinya yang strategis di jalur nasional yang menghubungkan Bandung, Garut, dan Tasikmalaya memberikan potensi ekonomi yang besar. Desa ini memiliki tiga dusun, 18 RW, dan 68 RT dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai, mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Partisipasi aktif warga juga menunjukkan keterlibatan tinggi dalam pembangunan desa.

Cipacing dikenal sebagai sentra industri pengrajin senapan angin, mata pencaharian utama mayoritas warganya. Namun, pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap perekonomian desa dengan menurunnya permintaan senapan angin. Selain tantangan ekonomi, isu ketahanan pangan menjadi perhatian utama, seiring kebijakan pemerintah tentang kemandirian pangan. Untuk mengatasi hal ini, desa menerapkan strategi berbasis partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program ketahanan pangan (Rusyandi, 2018; Dewi, 2015).

Penelitian sebelumnya menyoroti perencanaan partisipatif dan pembangunan desa berkelanjutan. Djuwendah et al. (2024)

menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Kaseng (2023) menemukan bahwa inovasi sosial dan ekonomi dapat meningkatkan ketahanan pangan desa, terutama selama pandemi (Ardiansyah et al, 2024; Sasmita et al, 2024). Hasil penelitian yang dilakukan Yanfika (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan meningkatkan efektivitas implementasi program pembangunan desa.

Namun, masih terdapat kesenjangan dalam penelitian terkait penerapan strategi pembangunan berkelanjutan pada desa berbasis industri seperti Cipacing. Studi sebelumnya cenderung memisahkan aspek ekonomi dan sosial tanpa mengintegrasikan pendekatan berkelanjutan yang mencakup ekonomi, sosial, dan lingkungan secara holistik (Sulismadi et al., 2017; Yudha et al 2024). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pembangunan di Cipacing berbasis partisipasi masyarakat, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta mengevaluasi capaian terhadap target yang ditetapkan. Selain itu, penelitian ini bertujuan menyusun rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas pembangunan berkelanjutan di desa ini.

Hasil penelitian ini diharapkan

berkontribusi dalam pengembangan model perencanaan partisipatif yang lebih efektif untuk mendukung pembangunan desa yang mandiri. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan pembangunan desa berbasis partisipasi masyarakat yang lebih optimal.

METODE PELAKSANAAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang sedang diteliti dan memperoleh data yang objektif serta kontekstual. Data yang dikumpulkan berbentuk narasi verbal yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu, kelompok, atau entitas yang menjadi fokus utama dalam pengumpulan data (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989: 862). Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Cipacing, Sekretaris Desa Cipacing, Ketua RW 09 Desa Cipacing, Masyarakat Desa Cipacing, dan Pengelola Peternakan Ayam di Desa Cipacing.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia.

Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dalam dua tahapan, yaitu pada tanggal 24 November 2023 dan 29 November 2023.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis tematik dengan tahapan sebagai berikut:

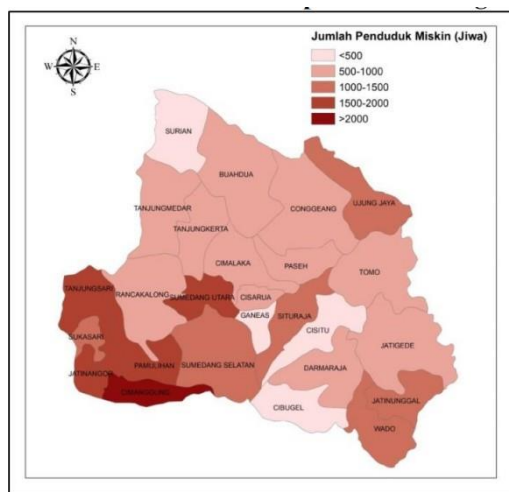
1. Identifikasi Masalah: Mengkaji isu-isu utama yang muncul dari wawancara dan observasi.
2. Analisis Pemangku Kepentingan: Mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat serta peran, fungsi, kepentingan, dan pengaruh mereka terhadap permasalahan yang diteliti.
3. Penyusunan Matriks SMART: Menganalisis strategi dan kebijakan yang dapat diterapkan berdasarkan prinsip Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound.
4. Monitoring dan Evaluasi: Menilai efektivitas kebijakan atau tindakan yang telah diterapkan.
5. Tindak Lanjut: Menyusun rekomendasi yang dapat diterapkan

untuk perbaikan di masa mendatang.

Hasil dan Pembahasan

Identifikasi Masalah

Kabupaten Sumedang memiliki skor indeks ketahanan pangan 81,73 yang artinya masuk dalam kategori tahan pangan tinggi (BKP, 2019). Meskipun demikian, informasi ini belum dapat mencerminkan ketahanan pangan secara detail di tingkat kecamatan, desa dan bahkan rumah tangga. Faktor kemiskinan menunjukkan kondisi keterbatasan masyarakat untuk memperoleh pangan. Kemiskinan merupakan salah satu gejala yang dapat mengakibatkan kerawanan pangan (Abidin & Pandodo, 2024). Kabupaten Sumedang memiliki persentase rumah tangga miskin sebanyak 16.966 jiwa dan menempati urutan ke-11 di Jawa Barat (BPS, 2019).



Gambar 2. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Sumedang

(Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019)

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Cipacing bergerak di bidang Kerajinan. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan (Sutrisna, 2021). Tingkat angka kemiskinan Desa Cipacing yang masih tinggi menjadikan Desa Cipacing harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat.

Peningkatan ketahanan pangan bagi masyarakat sekitar Desa Cipacing merupakan hal yang genting dan perlu adanya solusi dalam permasalahan fundamental seperti ini. Keterbatasan akses terhadap sumber pangan yang bervariasi dapat disebabkan oleh kurangnya keberagaman produksi pertanian, peternakan atau terbatasnya pasokan dari

luar. Akses pasar yang terbatas dapat menjadi ancaman dalam memasarkan hasil dan menjaga ketahanan pangan, karena ini bisa mengurangi insentif untuk meningkatkan produksi (Lestary et al., 2022). Dengan demikian, dibutuhkan suatu upaya konkrit yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ketahanan pangan di Desa Cipacing dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, kelompok-kelompok desa, akademisi dan pemerintah.

Identifikasi Stakeholder

Dalam pengembangan ketahanan pangan di Desa Cipacing, terdapat beberapa pemangku kepentingan yang berperan penting untuk mewujudkannya. Untuk lebih memahami dan mendukung pengembananan ketahanan pangan akan dilakukan pemetaan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi dan masyarakat.

1. Pemerintah Pusat

Stakeholder dari pemerintah pusat yang ikut berperan dalam peningkatan ketahanan pangan Desa Cipacing adalah Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional. Berfokus dengan apa yang direncanakan Kementerian Pertanian pada tahun 2020-2024 dengan tujuan untuk meningkatnya pemantapan ketahanan pangan, mengalokasikan dana untuk program ketahanan pangan desa.

Anggaran tersebut nantinya akan disalurkan oleh Badan Pangan Nasional dengan memetakan berbagai wilayah yang membutuhkan program peningkatan ketahanan pangan.

2. Pemerintah Daerah

Stakeholder dari pemerintah daerah yang ikut berperan dalam peningkatan ketahanan pangan Desa Cipacing meliputi pemerintah daerah yang berkedudukan di tingkat provinsi hingga tingkat desa. Pemerintah daerah bertugas mendistribusikan dana yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat.

3. Akademisi

Stakeholder dari akademisi yang ikut berperan dalam peningkatan ketahanan pangan Desa Cipacing adalah lembaga pelatihan, pendampingan dan penyuluhan. Akademisi bertugas sebagai fasilitator yang mendampingi kelompok masyarakat desa dalam peningkatan ketahanan pangan.

4. Masyarakat

Masyarakat merupakan *stakeholder* penting dalam peningkatan ketahanan pangan Desa Cipacing. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan inti dari pengembangan ketahanan pangan ini. Kemajuan program sangat tergantung SDM dari merupakan anggota masyarakat.

Tabel 1. Pengaruh dan Peran *Stakeholder*

No	Kategori <i>Stakeholder</i>	<i>Stakeholder</i>
1	Pemerintah Pusat	- Kementerian Pertanian - Badan Pangan Nasional
2	Pemerintah Daerah	- Bappeda Dinas Pertanian dan Peternakan - Badan Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluhan - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan - Pemerintah Desa
3	Akademisi	- Lembaga Penelitian dan Pendidikan - Lembaga Pendampingan dan Penyuluhan
4	Masyarakat	- Kelompok Usaha Bersama (KUBE) - Kelompok Tani - Karang Taruna

Identifikasi Pengaruh dan Peran *Stakeholder*

Setiap *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan ketahanan pangan Desa Cipacing memiliki peran masing-

masing. Berikut ini disajikan tabel tentang pengaruh dan peran *stakeholder* dalam pengembangan ketahanan pangan, dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengaruh dan Peran *Stakeholder*

No	<i>Stakeholder</i>	Pengaruh	Kepentingan	Action	Resource
1	Kementerian Pertanian	- Memberikan kontribusi yang cukup besar untuk pengadaan sarana, prasarana dan menyediakan anggaran	- Menyukses kan program ketahanan pangan desa	- Memberikan bantuan berupa modal membangun peternakan ayam petelur	- Tersedianya anggaran dana untuk pengembang an usaha dalam bidang ayam petelur
2	Badan Pangan Nasional	- Menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan	- Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan	- Memberikan regulasi dan menjamin keamanan pangan	- Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan
3	Bappeda Kabupaten Sumedang	- Merencanakan pengembangan wilayah dengan melibatkan berbagai sektor hingga tahap monitoring evaluasi	- Memajukan wilayah - Meningkatkan program yang sesuai	- Memberi dukungan pengembangan ketahanan pangan	- Memberikan izin kepada unit usaha kelompok masyarakat
4	Badan Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluhan	- Memetakan target program ketahanan pangan	- Menetapkan target sasaran program - Memastikan target sasaran sesuai berdasarkan urgensi	- Pendamping an kepada target program	- Tenaga penyuluh dan pendamping
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	- Merancang program ketahanan pangan	- Memajukan ketahanan pangan	- Memberi dukungan pengembangan ketahanan pangan	- Memberi kan ijin kepada unit usaha

No	Stakeholder	Pengaruh	Kepentingan	Action	Resource
6	Pemerintah Desa	- Instansi terendah yang berhak memberikan legalitas perijinan kegiatan maupun pengajuan proposal - Berhak memberikan bantuan dana pengembangan	- Memajukan wilayah - Membuka lapangan pekerjaan - Meningkatkan pendapatan masyarakat	- Memberi dukungan pengembangan ketahanan pangan - Memberikan pengesahan ijin ataupun proposal	- Pemangku kebijakan - Pelayanan dan perijinan - Penyedia data dan Informasi - Pemberdayaan masyarakat
7	Lembaga Penelitian dan Pendidikan	- Melakukan kajian seputar program terkait	- Pengembangan keilmuan	- Melakukan identifikasi dan menyebar kuesioner	- Penelitian sebelumnya
8	Lembaga Pendampingan dan Penyuluhan	- Melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada kelompok masyarakat	- Meningkatkan kualitas SDM	- Melakukan pendampingan sebagai fasilitator	- SDM Pencerdasan
9	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	- Menginisiasi pengembangan program ketahanan pangan - Mengajukan proposal	- Memajukan wilayah - Membuka lapangan pekerjaan - Menambah keterampilan pengelolaan - Meningkatkan pendapatan	- Pengelolaan peternakan ayam - Ikut terlibat dalam tahapan pengembangan ketahanan pangan	- Organisasi yang aktif - Anggota dan pengurus yang aktif - SDM
10	Kelompok Tani	- Menginisiasi dikembangkan nya pertanian	- Memajukan wilayah - Membuka lapangan pekerjaan - Menambah keterampilan pengelolaan - Meningkatkan pendapatan	- Pengelolaan pertanian - Ikut terlibat dalam tahapan pengembangan ketahanan pangan	- Organisasi yang aktif - Anggota dan pengurus yang aktif - SDM
11	Karang Taruna	- Berpartisipasi dalam persiapan dan peningkatan ketahanan pangan	- Membuka lapangan pekerjaan - Menambah keterampilan pengelolaan - Meningkatkan pendapatan	- Melakukan gotong royong - Menyumbangkan ide dalam rangka penyiapan konsep	- SDM - Tenaga Pikiran, ide

Kepentingan dan Pengaruh *Stakeholder*

Pemetaan *stakeholder* dalam pengembangan ketahanan pangan Desa Cipacing didasarkan pada tingkat kepentingan dan pengaruh *stakeholder* dalam pengembangan ketahanan

pangan. Tingkat kepentingan *stakeholder* diukur menggunakan 4 indikator, sedangkan tingkat pengaruh *stakeholder* diukur dengan menggunakan 3 indikator. Kemudian menggunakan matriks kepentingan dan

pengaruh *stakeholder* pemberian skoring dilakukan terhadap setiap *stakeholder* sesuai *action* yang dilakukan dalam pengembangan ketahanan pangan. Hal ini untuk mengukur tingkat pengaruh dan kepentingan *stakeholder* dalam pengembangan ketahanan

pangan Desa Cipacing. Untuk lebih jelasnya pembagian *stakeholder* dalam pengembangan ketahanan pangan Desa Cipacing dapat dilihat dalam matriks pemetaan *stakeholder* pada **gambar 2**.

	Pengaruh Besar	Pengaruh Kecil
Kepentingan Tinggi	1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 3. Kelompok Tani 4. Lembaga Pendampingan dan Penyuluhan	1. Karang Taruna
Kepentingan Rendah	1. Badan Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluhan 2. Kementerian Pertanian 3. Badan Pangan Nasional 4. Lembaga Penelitian dan Pendidikan	1. Bappeda Dinas Pertanian dan Peternakan 2. Pemerintah Desa 3.

Gambar 2. Matriks Kepentingan dan Pengaruh *Stakeholder*

Berdasarkan hasil analisis *stakeholder mapping* yang dilakukan dapat diketahui bahwa keberhasilan dari kolaborasi *stakeholder* sangat mendukung pengembangan ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi, hal ini memudahkan komunikasi antar *stakeholder* (Nindatu, 2019; Matdoan, 2015). Masing-masing *stakeholder* terlibat sesuai perannya dan tupoksinya masing-masing. Pemerintah pusat dan daerah selaku pemangku kebijakan berhak memberikan perizinan, anggaran dan melakukan pendampingan, akademisi sebagai pendamping dan peneliti pengembangan ketahanan pangan Desa Cipacing.

Penyusunan Tujuan yang Jelas dan Terukur

SMART (*Specific, Measureable, Achievable,*

Relevant, Time-Bound) merupakan salah satu metode identifikasi untuk menentukan target atau tujuan secara detail. Metode SMART menjelaskan secara jelas dan tidak ambigu serta menggunakan pengukuran yang konkrit dapat diukur atau bersifat kuantitatif. Penentuan tujuan menekankan pada seberapa besar dapat diimplementasikan atau realistis, memiliki manajemen dan koordinasi yang jelas antara aspek-aspek SMART dan memiliki jangka waktu yang telah ditargetkan (Rusyandi, 2018; Rahman et al, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa *stakeholders* yang ada di Desa Cipacing, peluang yang diidentifikasi dapat dikorelasikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Beliau telah menyebutkan tujuan

yang ingin dicapai dari program yang sedang dijalankan dan rencana keberlanjutan. Permasalahan yang dihadapi adalah perencanaan tujuan yang kurang matang mengakibatkan ketidakjelasan atau bahkan kerugian saat program-program telah berlangsung (Yudha eta al 2020). Untuk itu perlu menyusun matriks SMART untuk mengidentifikasi tujuan yang jelas dan terukur dari Desa Cipacing. Berikut adalah analisis SMART yang saat ini.

Specific

Langkah yang diambil oleh kepala desa Cipacing ingin membangun mandiri pangan dengan memberikan kesempatan masyarakat desa untuk membangun usaha peternakan ayam kampung, ayam petelur, bebek, lele, domba dan kelinci.

Measureable

Meningkatkan persentase ketahanan pangan dari 20% menjadi setidaknya 50% dan terus meningkat. Ketahanan pangan sudah berjalan di RW 14, 16, 17, 9, dan 7. Total RW yang ada di Desa Cipacing ada 18, sehingga target yang diukur oleh kepala desa adalah seluruh 18 RW.

Achievable

Kepala desa memberikan informasi

pendanaan dalam musyawarah desa untuk mengumpulkan masyarakat desa yang memiliki minat beternak. Kemudian, kepala desa berkoordinasi dengan TPK (Tim Pelaksana Kerja) dalam pembelian hewan-hewan ternak, pakan, dan pendirian kandang. Pihak desa melakukan monitoring pada periode-periode tertentu untuk mengecek kesehatan dan pertumbuhan hewan ternak, serta masyarakat melakukan pelaporan pada pihak desa mengenai hewan ternak yang dipelihara.

Relevant

Dalam musyawarah desa, mayoritas masyarakat desa melakukan pendanaan untuk modal menjadi peternak adapun sebagian kecil masyarakat, RW 07, mencoba *urban farming* dengan menanam sayuran hidroponik. Disisi lain, masyarakat desa memiliki lahan kosong yang dapat digunakan sebagai lahan untuk beternak dan bercocok tanam.

Timebound

Untuk seluruh program yang sedang berjalan dan dalam tahap perencanaan, capaian belum memiliki target yang pasti, kepala desa hanya memiliki target dengan acuan “secepatnya.

Tabel 4. Matriks SMART Desa Cipacing

Specific	Measureable	Achievable	Relevant	Timebound
Desa Cipacing memiliki ketahanan pangan yang kuat	Peningkatan persentase nilai ketahanan menjadi lebih dari 50% di seluruh lingkup RW	Desa Cipacing memberikan kesempatan mandiri usaha pada masyarakat untuk beternak dan bertani didukung dengan permodalan	Banyak lahan kosong di rumah masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan beternak dan bertani	Secepatnya

Pada **tabel 4** Kolom *specific, measureable, achievable*, dan *relevant* tergambar dengan jelas. Pengukuran tujuan dengan persentase dapat terukur dengan pasti dengan target yang cukup besar. Desa Cipacing dinilai memiliki tujuan yang selaras dengan situasi dan kondisi masyarakat. Akan tetapi, karena seluruh program kerja tidak dibawakan dengan linimasa yang jelas, banyak program kerja yang tidak efektif dan efisiensi (Yudha et al, 2024; Yudha et al 2025).

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring merupakan tahap penilaian mengenai *input* yang diimplementasikan apakah selaras dengan *output* yang dituju (Rusdi, 2018). Evaluasi merupakan tahap menganalisis ketidakefektifan suatu program untuk mengetahui faktor-faktor penghambatnya, sehingga dapat diperbaiki dan dimonitoring kembali perkembangannya. Tahap monitoring dan evaluasi ini perlu rutin dilaksanakan untuk mengetahui capaian,

hambatan, dan tingkat relevansi dari program kerja tersebut. Berikut adalah analisis cara monitoring dan evaluasi desa Cipacing.

Monitoring

Pihak pusat memberikan fasilitas pemantauan dan pendampingan melalui pendamping kelompok pada setiap desa untuk mengontrol hewan ternak. Berdasarkan salah satu hasil interview dengan peternak ayam petelur di RW 9. Monitoring program ketahanan pangan melalui usaha peternakan tidak efektif dijalankan, aliran modal yang berikan oleh pihak desa tidak sesuai dengan *input* modal untuk melanjutkan usaha peternakan ayam petelur.

Evaluasi & Langkah Perbaikan

Pihak desa mendengarkan aspirasi dan *feedback* dari masyarakat mengenai program ketahanan pangan melalui para RW. Dari tanggapan yang diterima, pihak desa menyadari bahwa program ketahanan pangan ini masih berada pada persentase 20%.

Tabel 5. Matriks SMART Langkah Perbaikan

Specific	Measureable	Achievable	Relevant	Timebound
Desa Cipacing memiliki ketahanan pangan yang kuat *Langkah perbaikan Ketahanan pangan dengan cara menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang lebih murah dari pasar	Peningkatan persentase nilai ketahanan menjadi lebih dari 50% di seluruh lingkup RW *Langkah perbaikan Memiliki target yang lebih spesifik, seperti data anggota kelompok setiap RW agar terekam dengan jelas setiap warga yang turut membantu	Desa Cipacing memberikan kesempatan mandiri usaha pada masyarakat untuk beternak dan bertani didukung dengan permodalan	Banyak lahan kosong di rumah masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan beternak dan bertani	Secepatnya *Langkah perbaikan 1. Pelaksanaan usaha peternakan tahap satu selama tiga bulan dan akan di monitoring secara berkala setidaknya satu minggu sekali oleh pendamping 2. Peningkatan keterampilan masyarakat dalam beternak dinilai dalam kurun waktu 6 bulan akan mendapatkan penanaman modal tetap

Evaluasi yang dapat disarankan adalah tindakan monitoring dilakukan secara lebih rutin, permodalan pakan sebaiknya diberikan secara cukup oleh desa hingga peternak di posisi stabil dalam arus kas keuangannya. Berdasarkan **tabel 4** pihak desa sebaiknya memiliki linimasa dan target waktu dalam mencapai target. Untuk itu dibuatlah **tabel 5** sebagai referensi langkah perbaikan yang disarankan supaya tujuan dan target lebih spesifik dan mengetahui panjang program kerja dengan pasti.

Tahapan Tindak Lanjut (Pasca Pelaksanaan)

Pengembangan dan inovasi merupakan bagian dari tahapan tindak lanjut, berdasarkan **tabel 4** dan **5** terdapat evaluasi yang dapat dikerjakan terlebih dahulu untuk kembali mengefektifkan program kerja ketahanan pangan. Pengembangan yang dapat diimplementasikan adalah perbanyak mitra peternak dan membentuk suatu unit dagang kebutuhan pokok untuk mencukupi kebutuhan pokok masyarakat desa dengan harga yang lebih stabil daripada harga pasar. Menurut kepala desa Cipacing ketika program kerja ketahanan pangan sudah stabil hingga hampir mencapai 100% akan sejalan dengan perbaikan ekonomi dan pembangunan desa. Untuk inovasi lain yang ingin diterapkan oleh beliau adalah penggalan potensi masyarakat desa, sehingga akan lebih beragam lagi mata pencaharian masyarakat desa Cipacing.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Mayoritas warga Desa Cipacing bekerja di sektor pertanian dan kerajinan, namun menghadapi keterbatasan lapangan kerja dan ketahanan pangan.
2. Pengembangan partisipatif melibatkan pemerintah sebagai pemangku kebijakan, lembaga pendidikan sebagai pendamping, dan warga sebagai pelaksana.
3. Dengan target peningkatan ketahanan pangan dari 20% ke 50%, desa membangun peternakan warga dan mendukung urban farming hidroponik.
4. Monitoring dilakukan secara berkala, dan desa mengevaluasi kelanjutan usaha berdasarkan efektivitasnya.

Saran

Desa Cipacing disarankan memperbanyak mitra peternak dan membentuk unit dagang kebutuhan pokok untuk menjaga stabilitas harga. Selain itu, kelompok pengelola program perlu mendapatkan sosialisasi supply chain agar lebih mandiri secara ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., & Pandodo, P. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Desa Tangguh Dan Partisipatif Menuju Desa Mandiri. *Akram Bakti: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 23-32.

- Ardiansyah, M., Anugrah, E. C., & Handayani, A. (2024). Pengembangan Desa Wisata Kali Singkut (Desa Berdaya), Jambi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri (JPMTB)*, 3(2), 176-185.
- Badan Ketahanan Pangan. (2018). Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan.
- BKP.Badan Ketahanan Pangan. (2019). Analisis Ketersediaan Pangan : Neraca Bahan
- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2020). Jumlah Keluarga Sejahtera dan Pra Sejahtera per Kecamatan di Jawa Barat 2019. BPS Jaw Barat.
- Dewi, A. (2015). Pengembangan Model Pendekatan Partisipatif Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Medan Untuk Memperbaiki Taraf Hidup. In Universitas Negeri Padang: Seminar nasional ekonomi manajemen dan akuntansi (snema) fakultas ekonomiISBN (pp. 978-602).
- Djuwendah, E., Yudha, E. P., Karyani, T., Wulandari, E., Saidah, Z., Rasmikayati, E., & Syamsiyah, N. (2024). SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN PEMBUATAN SITE PLAN AGROEDUWISATA SMP BINA HARAPAN JATIGEDE SUMEDANG. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(3), 926-933.
- Kaseng, E. S. (2023). Analisis pendekatan komunikasi partisipatif lembaga desa dalam pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Riset Pembangunan*, 1(3), 42-52.
- Lestary, R. A., Hadi, K., & Romadhan, A. A. (2022). Implementasi Program Desa Berdaya Melalui Economic Branding Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 10(1), 340-350
- Matdoan, U. (2015). Peranan Program Pnpm-Mandiri Pedesaan Dalam Mendorong Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal. *BIOSEL (Biology Science and Education): Jurnal Penelitian Science dan Pendidikan*, 4(1), 29-39.
- Nindatu, P. I. (2019). Komunikasi Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengentasan Kemiskinan. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 3(2), 91-103.
- Rahman, N., Saidah, A., & Yudha, E. P. (2024). Faktor-faktor yang Memengaruhi Penghidupan Berkelanjutan (Sustainable Livelihood) Petani Pinggiran Kota Bandung. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 10(1), 1474-1483.
- Rahmah, U., Saidah, Z., & Yudha, E. P. (2024). Struktur Nafkah pada Rumah Tangga Desa Agrowisata. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 10(1), 1343-1350.
- Rusdi, Z., & Trisnawarman, D. (2018). Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Monitoring Dan Evaluasi Program Pembangunan Desa. *Computatio: Journal of Computer Science and Information Systems*, 2(2), 169-177.
- Rusyandi, D., & Rachmawati, R. (2018). Evaluasi Penilaian Kinerja dengan Menggunakan Metode SMART dan Dampaknya Terhadap Kepuasan Kerja.

- Sasmita, V. A., Darmawan, A., & Basyar, M. R. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Desa Berdaya Di Desa Kedungpring Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 3(2), 78-86.
- Sulismadi, S., Wahyudi, W., & Muslimin, M. (2017). Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government (E-Government) menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing. *Aristo*, 5(2), 216-258.
- Sutrisna, I. W. (2021). Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 1-10.
- Sururi, A., & Mulyasih, R. (2017). Pemberdayaan Masyarakat melalui Inovasi Perencanaan Pembangunan berbasis 4R (Rembug, Rencana, Realisasi dan Rawat) di Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam sebagai Pilar Utama Kebijakan Partisipatif dan Gotong Royong. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 218-238.
- Yanfika, H., Nurmayasari, I., Rangga, K. K., & Silviana, F. (2023). Dukungan Lembaga dan Tingkat Partisipasi Petani dalam Keberlanjutan Usahatani Padi Sehat di Desa Rejo Asri. *Jurnal Penyuluhan*, 19(01), 22-33.
- Yudha, Eka Purna, et al. "Rural development policy and strategy in the rural autonomy era. Case study of Pandeglang Regency-Indonesia." *Human Geographies* 14.1 (2020): 125-147.
- Yudha, Eka Purna, et al. "Pengukuran pengaruh belanja desa terhadap kinerja pembangunan desa dengan menggunakan geographically weighted regression." *TATALOKA* 20.1 (2018): 23-34.
- Yudha, Eka Purna, and Resa Ana Dina. "Pengembangan potensi wilayah kawasan perbatasan negara Indonesia (studi kasus: Ranai-Natuna)." *Tata Loka* 22 (2020): 366-378.
- Yudha, E. P., Setiawan, I., Ernah, E., Fatimah, S., & Karyani, T. (2024). Desain Program Partisipatif Pembangunan Perdesaan: Studi Kasus Desa Genteng, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. *Abdimas Galuh*, 6(2), 2356-2372.
- Yudha, E. P., Hapsari, H., Rasmikayati, E., & Dina, R. A. (2024). Perencanaan Pembangunan Perdesaan Partisipatif: Studi Kasus Solusi Masalah Kebersihan di Desa Cileles. *Abdimas Galuh*, 6(2), 2345-2355.